

PESANTREN, NASIONALISME, DAN MULTIKULTURALISME DI INDONESIA

Ahmad 'Ubaydi Hasbillah

Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta

Abstract:

Religion and state for some countries deemed unable to work in harmony. At the same time, some other countries actually believe that religion can strengthen the integrity and resilience of the country. The experience of a country affects the paradigm of the relation between religion and the state, of course. However, experience alone is not enough if it is not supported by reliable human resources. Therefore, this study would like to assert that the development of nationalism is the main task of religious education. Religion and state must be properly managed through an established educational system in order to foster the spirit of nationalism. Through a historical survey and educational curriculum, Pesantren proven to contribute greatly to the independence of Indonesia. Transnationalism displayed by some of the pesantren alumni are sourced from outside. If Robert Jackson (2004) offers a model of "inclusive schools" to build nationalism through religious education based on multiculturalism, then Indonesia should promote pesantren as an alternative bid.

Keywords: Religion, Nationalism, Pesantren, Indonesian-ness and citizenship

Abstrak:

Agama dan negara bagi beberapa negara dianggap tidak dapat berjalan secara harmonis. Pada saat yang sama, sebagian negara lain justru meyakini bahwa agama dapat memperkuat keutuhan dan ketahanan negara. Pengalaman suatu negara sangat berpengaruh terhadap paradigma relasi agama dan negara tentunya. Meski demikian, pengalaman saja tidaklah cukup jika tidak didukung oleh sumber daya manusia yang handal. Karena itulah, penelitian ini hendak menegaskan

bahwa tugas pembangunan nasionalisme adalah tugas utama pendidikan agama. Agama dan negara, keduanya harus dikelola dengan baik melalui sistem pendidikan yang mapan agar dapat menumbuhkan semangat nasionalisme yang tinggi. Melalui survey sejarah dan kurikulum pendidikan, Pesantren terbukti mampu memberikan sumbangan yang sangat besar bagi kemerdekaan Indonesia. Transnasionalisme yang ditampilkan oleh beberapa alumni pesantren adalah bersumber dari luar. Jika Robert Jackson (2004) menawarkan model "sekolah inklusif" untuk membangun nasionalisme melalui pendidikan agama berbasis multikulturalisme, maka Indonesia patut mempromosikan pesantrennya sebagai tawaran alternatif.

Kata Kunci: *Agama, Nasionalisme, Pesantren, Keindonesiaan, dan Kewargaan*

A. Pendahuluan

Ada dua variabel yang hendak dibicarakan dalam makalah ini, yaitu pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam dan nasionalisme. Pesantren dipilih karena peranannya sebagai lembaga pendidikan yang unik cukup dapat diperhitungkan dalam membangun negara-bangsa. Pada saat yang sama, pesantren seringkali tersubordinasi karena memiliki kurikulum yang berbeda dari pemerintah dan cenderung "sulit diatur" oleh negara. Pesantren sebagai lembaga pendidikan informal juga seringkali mendapat sorotan dari para pengkaji sebagai pendidikan yang melahirkan individu-individu muslim militan. Beberapa alumninya bahkan disinyalir terlibat dalam jaringan terorisme global sehingga membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Singkatnya, nasionalisme pesantren menjadi dipertanyakan.

Hal ini berbeda dari madrasah yang memang merupakan lembaga pendidikan Islam formal dan tunduk pada setiap aturan pemerintah. Dalam hal nasionalisme, madrasah tentu tidak diragukan lagi secara kurikulum, materi, dan metode pengajarannya, karena dalam hal ini negara secara langsung yang menyusun, mengatur dan mengawasinya. Namun, pada saat yang sama, madrasah juga dinilai gagal oleh sebagian akademisi pesantren dalam mencetak kader-kader

yang militan dalam beragama, terutama dalam pendidikan moral dan mental keagamaan.

Sementara itu, nasionalisme yang merupakan sikap mental di mana loyalitas tertinggi dari individu adalah untuk negara-bangsa, juga menjadi isu sentral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tugas pembinaan nasionalisme dan semangat kebangsaan saat ini adalah tugas utama pendidikan. Sebagaimana diamanahkan oleh para perumus bangsa, pekerjaan pembangunan bangsa adalah pekerjaan utama pendidikan.¹ Karena itu, pemerintah dalam hal ini merasa perlu untuk merumuskan secara utuh sistem pendidikan nasional. Hanya saja, perjuangan bangsa yang sangat rumit dan panjang serta diwarnai oleh beragam corak ideologi dan agama, membuat sistem tersebut sulit dituntaskan.

Pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan yang usianya jauh lebih tua dari negara ini, di samping memiliki peranan yang sangat besar dalam perjuangan bangsa, juga tidak serta merta mau menerima sistem yang telah dirumuskan oleh negara. Pesantren cenderung mempertahankan sistem pendidikan tradisionalnya meskipun belakangan, sebagian pesantren telah bersedia mengadopsi sebagian sistem pendidikan nasional tersebut. Meski demikian, pesantren dengan kurikulumnya yang sangat khas, juga tidak serta merta dapat dinyatakan sebagai pendidikan yang anti negara, yang tidak mengajarkan nasionalisme, atau sebagai sebagai pusat jaringan transnasionalisme.

Asumsi demikian semakin dipertanyakan kembali seiring dengan beberapa fenomena mengejutkan yang diperlihatkan oleh beberapa alumni pesantren. Belakangan ini, muncul anggapan bahwa pendidikan Islam identik dengan tindak kekerasan dan terorisme. Sejak tragedi 11 September di Amerika Serikat dan Bom Bali II pada Oktober 2002, pendidikan Islam di Asia Tenggara menjadi pusat sorotan dunia. Sebelumnya, pendidikan Islam Asia Tenggara sangat kurang mendapat perhatian para peneliti dunia. Pesantren sebagai salah satu representasi pendidikan Islam khas Indonesia juga tak luput dari sorotan, terutama ketika beberapa alumninya terlibat

¹Achadiat K. Mihardja, *Polemik Kebudayaan* (Jakarta: Pustaka Jaya, cet. 4, 1986), 121-130.

diduga kuat terlibat dalam bom Bali tersebut. Pesantren al-Mukmin di Solo Jawa Tengah disebut-sebut sebagai almamater para pengebom di Bali.²

Pesantren sebagai basis pendidikan Islam pun menjadi tercoreng nama baiknya seiring dengan keterlibatan beberapa alumni pesantren dalam jaringan terorisme global. Fenomena ini diam-diam menimbulkan disintegrasi bangsa, baik secara vertikal, maupun horizontal. Tentu hal ini sangat membahayakan bagi pertahanan dan keutuhan bangsa Indonesia. Nasionalisme sebagai benteng pertahanan yang paling mendasar juga terancam oleh pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama dan negara.

Hefner menyebut ada dua teori untuk membaca fenomena ini. Pertama bagi kebanyakan teoritis Barat yang sejak lama meyakini bahwa politik muslim Asia Tenggara adalah moderat, menafsirkan peristiwa tersebut sebagai bentuk kegelisahan dan kebuntuan politik (*anxiety and confusion*). Kedua, para analis juga menyatakan bahwa Indonesia merupakan terusan dari jaringan terorisme global al-Qaida, yang misi utamanya adalah memerangi Barat.³

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, teori manakah yang lebih tepat untuk membaca fenomena agama (Pesantren) dan nasionalisme di Indonesia? Dapatkah tuduhan bahwa pesantren mengajarkan transnasionalisme dan terorisme dibenarkan hanya dengan melihat tindakan beberapa alumninya? Lalu bagaimana sebenarnya pesantren di Indonesia mengajarkan Islam secara umum, dan relasi agama dengan negara secara khusus? Dan bagaimana pesantren mempertahankan identitasnya sebagai salah satu institusi penyumbang ulama nasionalis terbesar itu?

B. Agama dan Negara: Sepasang Saudara Kembar

Agama dan negara, keduanya adalah bagian terpenting dalam hidup kita sebagai muslim Indonesia. Negara tanpa agama bisa

²Robert W. Hefner, "The Politics and Cultures of Islamic Education in Southeast Asia," dalam Robert Hefner (Ed.), *Making Modern Muslims: the Politics of Islamic Education in Southeast Asia* (Honolulu: University of Hawai'i Press, 2009), 1.

³Robert W. Hefner, "The Politics and Cultures of Islamic Education in Southeast Asia," 2.

binasa, sebagaimana agama tanpa negara menjadi tak berdaya. Dalam konteks global, keduanya harus dapat bersinergi dan berjalan secara harmonis. Al-Ghazālī (w.505 H) bahkan mengumpamakan keduanya dengan sepasang saudara kembar, seperti dua sisi koin yang tak akan ada jika salah satunya tiada.

"[A]l-dīn wa al-sultān taw'amāni. Al-dīnu ussun wa al-sultān ḥāris. Fa mā lā ussa lahū fa mahdūm, wa mā lā ḥārisa lahū fa dā'i."

"Agama dan pemimpin adalah dua hal yang kembar (sama peranannya). Agama sebagai pondasi, sedangkan pemimpin sebagai penjaga. Sesuatu yang tidak memiliki pondasi, pasti roboh. Sesuatu yang tidak memiliki penjaga, pasti hilang."⁴

Kata "*sultān/pemimpin*" dalam pernyataan al-Ghazālī di atas merupakan representasi dari suatu negara atau kaum. Para ulama bersepakat bahwa mendirikan sebuah negara adalah sangat vital dalam Islam. Bahkan posisi *dawlah* atau kenegaraan sudah mencapai tonggak *maṣlahah darūriyyah* (kebutuhan primer), bukan lagi sekadar *ḥājīyyah* (sekunder) atau bahkan hanya *taḥsīniyyat* (tersier). Penetapan status "darurat/primer" ini bukan didasari oleh faktor politis karena adanya kepentingan-kepentingan pragmatis dari beberapa pihak.⁵ Status tersebut semata-mata muncul karena pertimbangan *maṣlahah 'āmmah* yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Tanpa Negara, kehidupan umat manusia tidak akan sejahtera. Atau lebih spesifik lagi, tanpa Negara, Islam hanya akan tinggal nama.

Pentingnya bernegara sebagaimana disinyalir oleh Imam al-Ghazali terletak pada posisi sebagai penjaga agama (*ḥāris*). Kemaslahatan terbesar umat Islam adalah masalah iman dan Islam. Karena itu, demi tegaknya Islam, para ulama memandang wajib hukumnya mendirikan sebuah negara yang dapat melestarikan agama

⁴Al-Ghazālī, *al-Iqtisād fī al-I'tiqād* (Beirūt: Dār Qutaybah, 2003), 255-256.

⁵Al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī 'Ulūm al-Sharī'ah* (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), ii, 12. Lihat juga Muḥammad Ḥusayn 'Abdullah, *Dirāsāt fī al-Fikr al-Islāmīy* (Beirūt: Dār al-Bayārīq, 1990), 44-45.

(*ḥāris*). Al-Māwardī (w. 450 H) menambahkan bahwa dasar kewajiban mengangkat seorang pemimpin adalah *ijmā'* ulama, bahwa kepemimpinan merupakan pengganti kenabian. Kewajiban mengangkat pemimpin merupakan sebuah perintah mendirikan negara. Dalam sebuah hadis bahkan ditegaskan bahwa seorang pemimpin adalah "mandataris" Allah di muka bumi.

"[‘A]n Abī Bakrah, qāla, sami‘tu rasūlallāh ṣallā Allāh ‘alayh wa sallam yaqūl, al-Sulṭān zill Allāh fī al-arḍ. Fa man akramahū, akramahū Allāhu. Wa man ahānahū, ahānahū Allāh."

Nabi saw bersabda, "Seorang pemimpin adalah bayangan [surga] Allah di muka bumi. Siapa yang memuliakan pemimpinnya, niscaya akan dimuliakan oleh Allah. Siapa yang menghinakan pemimpinnya, maka akan dihinakan pula oleh Allah." (HR. al-Bayhaqi)⁶

Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim, dalam sejarah perjalanannya sering dihadapkan pada wacana besar seputar ketidakharmonisan hubungan antara agama dan negara. Munculnya gerakan-gerakan transnasional yang membawa nama agama Islam seringkali membuat pemerintah dan warga negara terusik kenyamanannya. Tidak hanya itu, gerakan tersebut juga menimbulkan citra negatif bagi Islam di mata dunia, seolah-olah Islam tidak mengizinkan bentuk negara-bangsa, seperti Indonesia ini.

Jika kita amati secara lebih seksama, gerakan-gerakan transnasional yang membawa nama Islam ini banyak melibatkan pemuda, khususnya para pelajar dan mahasiswa.⁷ Para pemuda memang sangat penting peranannya bagi sebuah pergerakan. Di samping karena semangatnya yang masih sangat menggebu-gebu, para pemuda biasanya lebih mudah dipengaruhi dan dicuci otaknya, lalu dimasukkanlah paham-paham radikalisme dan transnasionalisme.

⁶Abū Bakr Aḥmad bin al-Ḥusayn bin ‘Alī Al-Bayhaqī, *al-Sunan al-Kubrā* (Haydar Ābād: Majlis Dā‘irat al-Ma‘ārif al-Nizāmīyah al-Kā‘inah, 1344 H.), viii, 162.

⁷Lihat Abdurrahman Wahid (Ed.), *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia* (Jakarta: The Wahid Institute, The Maarif Institute, dan Gerakan Bhinneka Tunggal Ika, 2009), 202-213.

Belakangan ini, Indonesia sering dihebohkan oleh munculnya pemuda-pemuda yang menyuarakan transnasionalisme dan bahkan ada yang tergabung dalam jaringan terorisme global. Menariknya, pemuda-pemuda tersebut kebanyakan berlatar belakang pendidikan sekolah-sekolah umum yang telah mengajarkan pendidikan kewarganegaraan.⁸ Minimnya pendidikan agama menimbulkan wawasan keagamaan yang tidak komprehensif dan pemahaman yang parsial. Dengan kata lain, pemahaman tentang kenegaraan dan keagamaan yang tidak seimbang akan membuat sepasang saudara kembar tersebut menjadi kurang elok karena tidak mirip dan tidak identik satu sama lain. Akibatnya, siswa dengan pemahaman yang timpang seperti itu akan sangat mudah dirasuki oleh pemikiran-pemikiran yang tidak bersumber dari pemahaman yang komprehensif (*kāffah*) tentang agama Islam. Pesantren sebagai lembaga yang *genuine* Indonesia memiliki potensi dan tanggung jawab yang sangat besar untuk mengatasi masalah besar bangsa ini.

Dalam konteks negara-bangsa yang menganut sistem demokrasi seperti Indonesia, hubungan antara agama dan negara pasti berbeda dari negara yang menganut sistem monarki, dan teokrasi. Radikalisme yang muncul di Indonesia dengan radikalisme yang muncul di Saudi Arabia, Suriah, Mesir, Irak, berbeda motifnya, meskipun keduanya saling berkaitan dan saling membentuk jaringan.⁹ Dalam konteks negara-bangsa yang demokratis, agama boleh jadi terpisah dari negara, namun tetap dalam satu kesatuan yang tak terpisahkan.¹⁰ Karena itu, radikalisme agama boleh jadi tidak dalam konteks melawan negara, melainkan perlawanan terhadap "agama baru" yang bernama "sekularisme".¹¹

Dengan demikian, komitmen untuk mempertahankan bentuk negara-bangsa juga melahirkan sebuah negara yang multi otoritas. Akibatnya, seorang warga negara boleh jadi menjadi tidak taat

⁸Wahid (Ed.), *Ilusi Negara Islam*, 204.

⁹Lihat Wahid (Ed.), *Ilusi Negara Islam*, 59.

¹⁰Lihat Robert Jackson, *Rethinking Religious Education and Plurality: Issues in Diversity and Pedagogy* (London-New York: Routledge Falmer, 2004), 161-162.

¹¹Lihat Robert Jackson, *Rethinking Religious Education and Plurality*, 20-21.

kepada negara, melainkan kepada *civil religion*. Hal demikian juga sering didapati di Indonesia. Seseorang lebih taat kepada tokoh sipil yang dianggap memiliki otoritas kuat, terutama di bidang agama, daripada kepada aparat pemerintah. Loyaltyas kepada *kiai* misalnya, dapat melebihi loyalita seseorang kepada pemimpin negara.

Dengan kata lain, hubungan antara agama dan bentuk negara-bangsa dapat menjadi hubungan yang mutualisme jika dikelola dengan baik. Jika para pemimpin negara mampu menjalin hubungan baik dengan otoritas-otoritas sipil, maka negara akan semakin kuat. Di sinilah, pentingnya untuk menyadari tentang siap yang menjadi tokoh di masyarakat, dialah yang memiliki otoritas tertinggi. Sebaliknya, penganut agama tidak lagi dapat percaya pada otoritas negara jika negara tidak mampu mengelola hubungan baiknya dengan otoritas agama.

Otoritas agama dalam konteks negara-bangsa yang religius melebihi otoritas-otoritas lain. Seorang warga negara dapat melakukan apa saja demi agamanya, meskipun negara tidak mendukungnya. Melalui teori ini pulalah dapat dipahami bahwa munculnya terorisme pada dasarnya adalah perlawanan terhadap sekularisasi yang dianggap sebagai agama baru, bukan perlawanan terhadap negara.

C. Pesantren: Model Pendidikan Agama yang Nasionalis-Multikulturalis

Secara umum, pendidikan dipahami sebagai proses penyadaran tanpa akhir, sepanjang hayat. Pendidikan agama berarti proses penyadaran tanpa akhir berbasis nilai-nilai agama. Sepintas, pendidikan agama tampak mempersempit makna pendidikan itu sendiri dengan membatasi pada agama tertentu. Pembatasan ini jika tidak dikelola dengan baik, pada gilirannya justru akan menimbulkan fanatisme yang berakibat pada perilaku tidak menghormati nilai-nilai agama lain atau universalitas nilai-nilai pedagogis. Di sisi lain, pendidikan agama memang sangat diperlukan bahkan menjadi sebuah keniscayaan, terutama bagi masyarakat religius seperti Indonesia. Dalam konteks negara-bangsa yang multikultur seperti ini, Indonesia perlu mempertimbangan pendidikan agama berwawasan multikulturalisme untuk mewujudkan cita-cita nasionalisme yang

berkeadaban. Dalam hal ini, pendidikan hendaknya memiliki karakter melakukan penghormatan dan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap harkat dan martabat manusia sepanjang hayat dari manapun dan berbudaya apapun manusia itu berasal.

Merancang pendidikan agama berbasis nasionalisme bukanlah hal yang mudah. Banyak negara di dunia ini yang dihadapkan pada masalah pelik dalam mewujudkan misi tersebut. Pendidikan multikulturalisme digadang-gadang sebagai solusi terbaik untuk mewujudkan nasionalisme-religius yang berkeadaban di Indoensia. Kaena itu, Indonesia juga perlu belajar banyak hal dari pengalamannya sendiri dan juga dari pengalaman negara lain yang telah mencoba menerapkan model pendidikan tersebut.

Dalam hal ini, Robert Jackson (2004) mengeksplorasi pengalaman negerinya, Inggris, dalam mengelola pendidikan agama berbasis multikulturalisme. Salah satu isu yang diusung adalah isu nasionalisme.¹² Menurutny pada akhir tahun 1950an, Inggris telah gagal mengelola pendidikan agama berbasis multikulturalisme. Pendidikan agama di Inggris saat itu tidak lain adalah pendidikan di bawah instruksi Gereja. Tentu hal ini menjadi sangat tidak sehat bagi hubungan kemanusiaan lintas kultur, budaya, etnis, dan terlebih lagi lintas agama. Kondisi seperti ini berlangsung hingga awal abad ke-2, setelah Inggris benar-benar menjadi negara dengan kondisi masyarakatnya yang sangat plural. Banyak sekali imigran dari berbagai negara dan membawa kultur serta agama yang berbedabeda. Kondisi yang oleh Jackson disebut dengan "*traditional plurality*" inilah yang kemudian menyadarkan masyarakat Inggris akan pentingnya mengelola multikulturalisme dengan konsep yang lebih modern (*modern plurality*).¹³ Lalu, pertanyaan besar yang diajukan oleh Jackson dalam konteks *modern plurality* yang sudah merambah ke berbagai aspek kehidupan adalah masih perlukah sekolah menyelenggarakan pendidikan agama yang sebelumnya mengatur kehidupan masyarakat Inggris? Jika masih bagaimana pendidikan agama dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat yang

¹²Robert Jackson, *Rethinking Religious Education and Plurality*, 13-14.

¹³Robert Jackson, *Rethinking Religious Education and Plurality*, 4-20.

plural dengan baik? Bagaimana seharusnya sekolah berurusan dengan agama-agama dalam hal kurikulum, prosedur, dan kebijakan?

Menurutnya, sebagai masyarakat Barat yang semakin multikultural dalam karakter, sekolah harus meninjau kembali penyediaan pendidikan agama dan melihat bagaimana mereka bisa beradaptasi untuk mengakomodir beragam pengalaman siswa dalam menyikapi pluralitas. Jackson menemukan ada tiga bentuk pendekatan dalam pendidikan untuk merespon pluralitas di Inggris. Pertama, adalah pendekatan tradisional (*Christian traditionalist*), yang dalam konteks modern sering dianggap sebagai upaya nostalgia terhadap romantisme sejarah pendidikan agama di Inggris. Kedua adalah pendekatan modern, yaitu menyediakan sekolah berbasis agama (*faith-based school*) yang mempromosikan keadilan sosial (termasuk toleransi agama), pengetahuan tentang agama-agama, dan pengembangan sikap kritis dan independen dalam berfikir dengan prinsip dialog dan interaktif antar sesama.¹⁴ Sementara itu, kelompok postmodernis menawarkan pendekatan "*Personal narrative*" yang mengedepankan prinsip melek agama (*religious literacy*). Prinsip inklusif menjadi ciri khas pendekatan ini. Dengan pendekatan ini, setiap siswa dari berbagai latar belakang dapat mengklarifikasi, mengkritisi, membentuk, dan menghukumi posisi masing-masing.¹⁵

Melalui pengkajian etnografis dan antropologi sosial secara mendalam, Jackson menawarkan pendekatan baru yang mengakomodir ketiga pendekatan tersebut, yaitu pendekatan *interpretive*. Dengan tawarannya ini, Jackson setuju bahwa dalam konteks masyarakat majemuk, pendidikan tetap saja sangat penting dilakukan. Pendekatan ini mirip dengan pendekatan *personal narrative*. Hal paling fundamental yang tidak tampak dari pendekatan *personal narrative* adalah pada prinsip mempertahankan keragaman (*diversity*).

Pada dasarnya, menurut Jackson, semua pendekatan tidak akan berjalan dengan baik jika masih terpusat pada guru. Pendekatan *interpretive*, karena itu, harus mengaktifkan peranan siswa. Dalam

¹⁴Robert Jackson, *Rethinking Religious Education and Plurality*, 161-163.

¹⁵Robert Jackson, *Rethinking Religious Education and Plurality*, 58-74 dan 87-108.

hal ini, siswa harus menjadi agen. Konsekuensinya, guru mata pelajaran agama dapat berasal dari pemeluk agama apapun dan bahkan dari orang yang tidak beragama sekalipun. Sebagai pendidik di sekolah umum—Jackson masih mengecualikan sekolah-sekolah agama, seperti sekolah Gereja—, seorang guru hanya bertugas memperkenalkan tentang ajaran suatu agama, bukan untuk mengajak mereka menganut agama tertentu.¹⁶

Pendekatan ini memiliki dasar pemikiran bahwa pendidikan agama adalah hal prinsip yang menjadi hak setiap individu untuk mendapatkan kehidupan yang baik (*good life*). Agama turut andil dalam mewujudkan kehidupan yang baik tersebut. Karena itu, suatu agama tidak boleh menghalangi agama lain untuk menawarkan konsepsi kehidupan yang baik. Masing-masing agama harus menjunjung tinggi "positive pluralism" dan menjauhi "negative pluralism". Atas dasar inilah, siswa harus diberi peluang untuk mempelajari dan merefleksikan keahlian interpretatif dan kritisisme positif terhadap perbedaan ajaran agama dan filsafat. Secara politis, beragama adalah hak bagi setiap individu dalam konteks negara yang demokratis. Karena itu, agama dan kehidupan beragama tidak boleh dihalangi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan, Jackson sangat tidak setuju dengan pandangan sekularis. Menurutnya, negara harus merumuskan kebijakan dan prosedur yang adil bagi semua, termasuk kebijakan tentang pendidikan agama. Ia bahkan menolak model sekolah sekuler, meskipun bukan sekolah agama (*the common school should not be a secularist school, but an inclusive school*). Dalam kaitannya dengan nasionalisme, Jackson berkontribusi menawarkan sebuah konsep pendidikan agama yang multikulturalis sehingga disintegrasi horizontal antar penganut agama dan juga disintegrasi vertikal, antara penganut agama dan pemerintah dapat diminimalisir.

Dalam konteks Indonesia, model pendidikan inklusif seperti ini telah banyak ditunjukkan oleh Pesantren, terutama di era modern. Dalam hal budaya, jelas Pesantren adalah garda terdepan dalam merawat tradisi lokal Indonesia. Melalui prinsip *al-muḥāfazah ‘alā al-qadīm al-ṣāliḥ wa al-akhdh bi al-jadīd al-aṣlah*, Pesantren berusaha

¹⁶Robert Jackson, *Rethinking Religious Education and Plurality*, 163-165.

menampilkan wajah yang inklusif, bukan eksklusif.¹⁷ Hal ini tentunya sangat mendukung terwujudnya semangat nasionalisme santri. Semangat inklusivisme dan multikulturalisme Pesantren ini tentunya juga tidak meninggalkan identitas keislaman yang memang menjadi ciri khas Pesantren. Dengan demikian, jika Jackson menawarkan sekolah inklusif untuk Inggris dalam hal menumbuhkan nasionalisme religius (berkeadaban), maka Indonesia juga telah memiliki lembaga pendidikan yang tidak kalah, yaitu Pesantren.

D. Pesantren dan (Trans) Nasionalisme

Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang khas Indonesia. Banyak sarjana melakukan penelitian tentang sejarah pesantren di Indonesia. Kajian Belanda menyatakan bahwa pesantren adalah perubahan dari institusi-institusi pra-islam Indonesia, seperti Hutan Pertapaan (*forest hermitage*), Mandala Communities, atau pusat-pusat transmisi ajaran Hindu-Budha (*Centers of transmission of Hindu and Buddhist scriptural knowledge*). Geertz dalam penelitiannya di Jawa, juga menemukan adanya institusi mirip pesantren pada masa Hindu-Budha di Jawa.¹⁸ Dari sinilah kemudian Geertz menyimpulkan bahwa ajaran-ajaran agama yang pernah eksis di suatu daerah (*pre-existing religious*), contoh tradisi, kelas dan bentuk sosial, serta kekuatan ekonomi adalah faktor utama yang mempengaruhi pembentukan Islam lokal.¹⁹ Termasuk di antaranya adalah institusi pendidikan Islam Indonesia, Pesantren.

Secara institusi, para sarjana juga mencoba menelusuri sejarah pesantren pertama di Indonesia. Hasilnya ditemukan bahwa pesantren baru pertama kali berdiri pada akhir abad ke-18 masehi di Ponorogo Jawa Timur. Adalah Pesantren Tegalsari namanya yang hingga kini pesantren ini masih tetap lestari. Pesantren saat itu didirikan sebagai

¹⁷Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan terhadap Kiai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia* (Jakarta: LP3ES, cet. 8, 2011), 72-75.

¹⁸Clifford Geertz, "The Javanese Kijaji: The Changing Role of a Cultural Broker," dalam *Comparative Studies in Society and History*, 2, No. 2 (Januari, 1960): 228-249.

¹⁹ Clifford Geertz, *Islam Observed: Religious Development in Morocco and Indonesia* (New Haven, Conn., 1968).

pendidikan lanjutan dari pendidikan agama tingkat dasar yang dilakukan secara informal di rumah-rumah warga dan masjid. Temuan tersebut menuai kontroversi terutama mengenai karakteristik, kurikulum, dan metode pendidikan pesantren yang memiliki kemiripan dengan beberapa jenis lembaga pendidikan di Timur-Tengah. Jaringan ulama di Nusantara dengan Timur-Tengah yang telah berlangsung sejak sebelum abad ke-17 masehi membuat teori Tegalsari semakin rumit. Dhofier (1978) melakukan rekonstruksi sejarah pesantren dan hasilnya adalah bahwa pesantren muncul jauh sebelum abad ke-17. Kesultanan Lamreh di Sumatera Utara sejak tahun 1200 diduga kuat telah mengembangkan pendidikan yang menjadi cikal bakal pesantren. Hal ini juga dikuatkan dengan rekonstruksi sejarah rihlah ilmiah seorang budayawan besar Nusantara yang dimakamkan di Babul Ma'la Makkah pada tahun 1527. Kepiawaian Hamzah Fansuri yang mengantarkannya menjadi ulama besar di Haramayn menunjukkan sejarah panjang keilmuan Islam di Nusantara sebelum akhirnya ia dapat hijrah ke Makkah. Sejarah panjang keilmuan Islam inilah yang kemudian menjadi cikal bakal pendidikan pesantren.²⁰

Bagaimanapun, sejarah awal pesantren di Indonesia tetap menampilkan hal yang berbeda dari warisan Hindu-Budha dan juga model pendidikan Timur-Tengah klasik. Pesantren tetap mengunggulkan nilai-nilai kearifan lokal dalam hampir setiap aspek. Ini menunjukkan bahwa Pesantren adalah lembaga pendidikan yang orisinal Indonesia meski (diduga) dikembangkan dari model-model lembaga pendidikan dari luar. Bahkan yang lebih menarik lagi adalah pesantren merupakan simbol perlawanan terhadap penjajah.²¹

Sebagai lembaga pendidikan agama yang asli milik Indonesia, tampaknya sulit dibenarkan jika pesantren mengajarkan hal-hal yang tidak mendukung Indonesia sebagai rumah besarnya. Pesantren tentunya memiliki cara pandang tersendiri dalam hal konsep sistem negara yang ideal, baik secara agama maupun budaya. Karena itu, keduanya tampak selalu menjadi pertimbangan bagi pesantren dalam

²⁰Dhofier, *Tradisi Pesantren*, 27-41.

²¹Dhofier, *Tradisi Pesantren*, 70-78.

menyikapi berbagai hal, khususnya yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Berbicara tentang pesantren dan nasionalisme pada dasarnya adalah berbicara tentang Islam dan nasionalisme, khususnya di Indonesia. Sebagai lembaga pendidikan Islam khas Indonesia, pesantren memiliki peranan yang sangat vital dalam menumbuhkan nasionalisme dalam jiwa setiap orang muslim. Hal ini karena secara sosiologis, masyarakat muslim Indonesia memiliki hubungan struktural-kultural yang kuat dengan para pemuka agama, para *kiai*.²² Meski akhir-akhir ini, seiring dengan berjalannya arus modernisasi, paradigma keberagamaan muslim Indonesia telah bergeser dan tidak lagi terlalu menjunjung tinggi *kiai*-sentris, bukan berarti peranan *kiai* menjadi tidak penting lagi. Masyarakat Islam Indonesia yang secara sosio-historis dibentuk oleh kekuatan agama, tidak dapat lepas dari kuatnya doktrin agama dan jurisprudensi Islam. Karena itu, semangat keberagamaan umat Islam Indonesia selalu terefleksikan dan bahkan mendominasi dalam hampir setiap aspek kehidupan.

Dalam konteks modernisasi Barat, terdapat beberapa perspektif tentang relasi agama dan nasionalisme. Pertama, agama dan nasionalisme adalah dua hal yang berbeda dan saling kontradiktif. Nasionalisme dianggap sebagai pandangan sekuler dan karena itu bertentangan dengan ajaran agama. Kedua, bangkitnya nasionalisme bertepatan dengan melemahnya kuasa agama terhadap negara. Ketika agama kehilangan kekuatan dalam negara, maka kesadaran rakyat dalam hal nasionalisme meningkat drastis. Ketiga, nasionalisme menggantikan peranan agama dalam mengatur segala aspek kehidupan sosial dan intelektual. Keempat, komunitas nasional tidak menggantikan peranan komunitas agama meskipun sedang melemah.²³

²²Dhofier, *Tradisi Pesantren*, 93-99.

²³Peter van der Veer dan Hartmut Lehmann (Eds.) *Nation and Religion: Perspectives on Europe and Asia* (Princeton: Princeton University Press, 1999), 3. Lihat juga Rupert Emerson, *From Empire to Nation: the Rise of Self-Assertion of Asian and African People* (Cambridge: Harvard University Press, 1960), 158. Abdullah al-Ahsan, *Ummah or Nation? Identity Crisis in Contemporary Muslim Society* (Wiltshire: Cromwell Press Ltd., 1992), 23. Bandingkan dengan Anthony Smith, *Theories of Nationalism* (London: Duckworth, 1983), 21.

Di beberapa negara maju di dunia muncul sebuah keyakinan bahwa agama justru hanya akan menumbuhkan disintegrasi sosial, baik vertikal maupun horizontal yang kemudian berujung pada transnasionalisme. Di Eropa misalnya, ketika Gereja mengatur dan bahkan menguasai negara, maka yang muncul adalah disintegrasi sosial.²⁴ Secara vertikal, masyarakat tidak lagi percaya kepada pemerintah karena kesewenang-wenangan Gereja dan tekanannya untuk menganut satu ajaran saja. Pada saat yang sama, rakyat juga menjadi tidak rukun dengan sesamanya karena prinsip-prinsip multikulturalisme sulit ditegakkan ketika negara berada di bawah kendali Gereja. Karena itulah di Inggris, agama menjadi momok hebat bagi warga setempat karena dianggap menimbulkan disintegrasi.²⁵

Kasus yang serupa juga terjadi di Amerika Serikat. Agama cenderung dihindari dalam konteks berbangsa dan bernegara. Prinsip multikulturalisme ditegakkan dengan sama sekali tidak boleh melibatkan unsur-unsur agama. Hal ini karena mayoritas warga Amerika sudah trauma dengan sejarah Eropa yang warganya memenuhi benua Amerika tersebut. Para Imigran dari Eropa tidak menginginkan peristiwa yang sama dengan negeri asalnya.

Jika nasionalisme seringkali dirujuk kepada modernisasi negara-negara Barat yang ternyata cenderung menghindari peranan agama, maka nasionalisme di Indonesia modern justru sebaliknya. Agama dalam pembangunan nasionalisme Indonesia justru memiliki peranan yang vital. Hal ini juga tidak lepas dari faktor historis. Indonesia direbut dan diperjuangkan atas dasar agama dan oleh orang-orang yang beragama.²⁶ Keberhasilan agama dalam

²⁴Robert Jackson, *Rethinking Religious Education and Plurality*, 4-21.

²⁵Robert Jackson, *Rethinking Religious Education and Plurality*, 5-8.

²⁶Karena itu pulalah, teks Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan dengan tegas bahwa kemerdekaan adalah pertama-tama atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, barulah kemudian didorong oleh keinginan luhur. Ikrar tersebut menunjukkan tingginya relijiusitas bangsa Indonesia, khususnya dalam memperjuangkan dan mensyukuri kemerdekaan. Akibatnya, agama pun mendapatkan tempat dan perhatian yang sangat tinggi dalam undang-undang. Bahkan dalam dasar negara, prinsip agama diposisikan dalam sila pertama. Undang-undang Dasar juga mengaturnya secara khusus, dan negara pun membentuk satu kementerian khusus yang menangani masalah agama, Kementerian Agama.

membangun nasionalisme di Indonesia karena adanya semangat persatuan yang didorong oleh kesamaan nasib dan kepentingan meskipun berangkat dari latar belakang yang berbeda-beda. Perbedaan wilayah geografis, ras, suku, agama, bahasa, golongan sosial, dan budaya bukannya menjadi penghalang bagi nasionalisme.²⁷ Adanya musuh bersama (*common enemy*) memang sangat penting dalam menyatukan keragaman tersebut.²⁸ Kesetiaan masyarakat agama kepada hal-hal yang menyangkut agama dan aliran kepercayaan akhirnya turut membakar semangat nasionalisme.²⁹

Dalam sejarah Indonesia, pernah muncul sebuah fatwa tentang kewajiban berjihad bagi muslim Indonesia untuk melawan dan mengusir Belanda dari tanah air. Fatwa tersebut ternyata mendapat apresiasi sangat positif dari seluruh rakyat Indonesia dan akhirnya pecahlah perang 10 November 1945 oleh *arek-arek Suroboyo* di bawah komando Bung Tomo. Fatwa jihad tersebut dideklarasikan oleh KH. Hasyim Asy'ari pada 24 Oktober 1945 dan tentu saja fatwa tersebut dilatarbelakangi oleh kepiawaiannya dalam bidang agama. Dengan demikian, fatwa-fatwa ulama tentang jihad dan konsep

²⁷Semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" memiliki peranan penting dalam menyatukan bangsa yang berbeda-beda secara fisik, agama, dan budaya tersebut. Kesamaan nasib dan keinginan luhur untuk memperjuangkan kemerdekaan adalah salah satu pemersatunya. Karena itu, nasionalisme di Indonesia seringkali didefinisikan sebagai kesadaran akan kebersamaan dalam perbedaan.

²⁸Adanya *common enemy* ini disimpulkan dari kumpulan tulisan tentang ide-ide pembangunan politik Indonesia pada masa Soekarno yang dibukukan oleh Herbert Feith dan Lance. Berbagai ideologi dan latar belakang bersatu padu memiliki keinginan yang kuat untuk membangun bangsa, namun mengalami kesulitan karena kuatnya masing-masing ideologi. Setidaknya ada dua hal terpenting yang dapat menyatukan mereka dalam satu wadah yang kemudian disebut dengan nasionalisme, yaitu "budaya Jawa" dan musuh bersama. Melalui isu *common enemy* inilah, Soekarno akhirnya memproklamkan berdirinya Nasakom untuk mengakomodir pemikiran-pemikiran ideologi besar tersebut. Lihat Herbert Feith, dan Lance Castles (Eds.), *Indonesian Political Thinking 1945-1965* (Jakarta-Kuala Lumpur: Equinox Publishing, 2007).

²⁹Semangat keagamaan itulah yang kemudian dipakai oleh Bung Tomo dalam membakar semangat *arek-arek Suroboyo* pada November 1945. Satu kalimat yang digunakan oleh Bung Tomo untuk membakar semangat tersebut adalah pekikan *takbīr*. Di sinilah, para santri dan umat Islam benar-benar tumpah ruah mengusi penjajah.

negara Islam *a la* Indonesia bukanlah hal yang bertentangan dengan nasionalisme.

Fatwa Kiai Hasyim tersebut dideklarasikan setelah mendapat konfirmasi dari Jaringan Islam Indonesia-Haramayn. Jauh sebelum itu, seorang mufti Hadramaut, Yaman, ‘Abd al-Raḥmān bin Muḥammad bin Ḥusayn bin ‘Umar Bā‘alawī al-Ḥaḍramī, dalam kompilasi fatwanya yang diberi judul *Bughyat al-Mustarshidīn*, mengapresiasi semangat juang rakyat Indonesia. Fatwa dalam kitab yang sangat populer dan menjadi rujukan utama dalam kajian fikih Syafi'i di Pesantren itu menyatakan bahwa tanah Betawi, khususnya, dan tanah Jawa (Indonesia) umumnya, adalah *Dār Islām* (negeri yang sah menurut Islam). Mufti Abdurrahman menegaskan bahwa suatu negeri dapat disebut *Dār Islām* jika didiami oleh orang-orang Islam dan mampu membela diri dari serangan lawan. Karena itulah, Kiai Hasyim semakin mantap dalam menetapkan fatwa jihad sebagai *farḍu ‘ayn* (wajib bagi setiap individu).³⁰

Karena itu, Feener melalui penelitiannya tentang buku-buku seputar hukum Islam yang ditulis pada pertengahan abad ke-20, menegaskan bahwa Islam sangat mendukung mazhab nasional. Keterlibatan umat Islam Indonesia dalam gerakan-gerakan keagamaan pada periode tersebut adalah dalam rangka membangun mazhab nasional. Ini menunjukkan bahwa Islam Indonesia, betapapun dibawa melalui jaringan Timur-Tengah, tetap memiliki karakteristik yang sangat berbeda dan asli Indonesia. Bahkan Islam Indonesia sangat mendukung negaranya sebagai negara yang demokratis dan resmi menurut agama. Karena itu, fikih-fikih yang khas Indonesia banyak disusun dan disahkan sebagai undang-undang yang dipatuhi oleh warga Indonesia. Hal ini tentu menjadi bukti bahwa Islam dan negara bukanlah dua entitas yang perlu dipertentangkan, bahkan keduanya dapat berpadu dan saling mendukung.³¹

Inilah yang membuat para cendekiawan muslim Indonesia dalam tahap berikutnya tetap mempertahankan Islam Indonesia yang memiliki kekhasan dalam konsep nasionalisme dan sistem

³⁰Lihat ‘Abd al-Raḥmān bin Muḥammad bin Ḥusayn bin ‘Umar Bā‘alawī al-Ḥaḍramī, *Bughyat al-Mustarshidīn* (Beirūt: Dār al-Fikr, t.th.), 541.

³¹R. Michael Feener, "Indonesian Movements for the Creation of a 'National Madhhab'," dalam *Islamic Law and Society*, vol. 9, No. 1 (2002), 83-115.

kenegaraan. Umat Islam Indonesia tidak merasa canggung untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar hidup berbangsa dan bernegara. Bagi sebagian besar warga muslim Indonesia, Pancasila dalam hal ini sama sekali tidak bertentang dengan al-Quran dan bahkan menjadi takwil dari al-Quran dan hadis Nabi. Karena itulah, Pancasila memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam pemikiran nasionalisme umat Islam Indonesia. Pancasila dengan demikian, memiliki kekuatan supra dalam misi harmonisasi agama dan negara.³² Bahkan mayoritas umat Islam Indonesia tidak menghendaki sebuah konsep negara Islam di Indonesia yang tidak menjadikan Pancasila sebagai dasarnya.³³

Lebih jelas lagi, Bruinessen (2008) juga menegaskan bahwa meskipun beberapa alumni pesantren terlibat dalam jaringan terorisme, Pesantren tetaplah lembaga yang bersih dari misi tersebut. Bruinessen tidak menemukan pendidikan terorisme di dalam lingkungan pesantren, bahkan di Pesantren Ngruki sekalipun. Para alumni tersebut terlibat dalam jaringan terorisme global yang mengancam nasionalisme setelah menjalani pendidikan di Afghanistan, Philippina, dan Malaysia.³⁴ Lebih lanjut, Hasan (2008) juga menambahkan bahwa ideologi transnasional tersebut lahir dari Yaman dan Pakisatan, bukan dari tradisi Pesantren.³⁵

Din Wahid (2014) juga menegaskan bahwa gerakan Salafisme yang disebut-sebut sebagai wadah jaringan transnasionalisme global di Indonesia juga tidak serta merta dapat disebut sebagai pengusung transnasionalisme. Pesantren Salafi ternyata tidak mengajarkan kurikulum yang mengarah kepada transnasionalisme. Bahkan tidak

³²Muhammad Ali, "Islam and the Indonesian Nation-State: the Religio-Political Thought of Abdurrahman Wahid." (Makalah, tidak diterbitkan)

³³Lihat Abdurrahman Wahid (Ed.), *Ilusi Negara Isla: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia* (Jakarta: The Wahid Institute, The Maarif Institute, dan Gerakan Bhinneka Tunggal Ika, 2009).

³⁴Martin van Bruinessen, "Traditional and Islamist Pesantren in Contemporary Indonesia," dalam Bruinessen, Farish A. Noor, dan Yoginder Sikand (Eds.), *The Madrasa in Asia: Political Activism and Transnational Linkages* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2008), 217-239.

³⁵Noorhaidi Hasan, "The Salafi Madrasas of Indonesia," dalam Bruinessen (et. all: Eds.), *The Madrasa in Asia: Political Activism and Transnational Linkages*, 247-270.

sedikit wali santri yang ditemukan tetap setia kepada ormas yang sering bertentangan dengan gerakan ini. Salafi sendiri terdiri dari beragama corak pemikiran, ada yang jihadis, harakis, dan *purist*. Semua kelompok salafi mengidolakan gerakan puritanisme. Corak yang paling keras adalah yang jihadis dan harakis. Menariknya, Pesantren Salafi yang Jihadis dan Harakis sekalipun, pada dasarnya tidak mengajarkan transnasionalisme, apalagi yang mengarah kepada terorisme. Karena itu, tidak semua alumni dari pesantren salafi terlibat dalam jaringan terorisme yang mengancam nasionalisme Indonesia. Pendidikan Pesantren Salafi tidak lain adalah untuk mengusung dan melestarikan ideologi serta manhaj *salaf* (*nurturing the salafi manhaj*). Misi utama pesantren salafi pada dasarnya adalah hanya untuk mengajarkan ajaran Islam dan mencetak para ulama. Hal ini sebagai bentuk respon dan ungkapan kekecewaannya terhadap model pendidikan madrasah yang cenderung sekuler di Pesantren.³⁶

Keterlibatan beberapa santri Salafi dan beberapa pesantren Salafi dalam jaringan global transnasionalisme terjadi setelah mereka mendapat sokongan dana yang besar dari Saudi Arabia dan Yaman. Namun, sebagaimana disebut sebelumnya, tidak semua alumni pesantren Salafi terlibat dalam jaringan transnasionalisme tersebut. Hanya mereka yang kemudian melanjutkan pendidikan di pusat-pusat jaringan itulah yang kemudian terlibat aktif dalam gerakan transnasionalisme.³⁷

E. Nasionalisme dalam Pendidikan Pesantren: Dari Teks ke Aksi

Peringatan Hari Pahlawan 10 November 2014 yang lalu, kembali menjadi hari yang bersejarah bagi dunia pesantren. Pasalnya, salah seorang ulama besar produk pesantren asli dari Jombang Jawa Timur, KH. Abdul Wahab Hasbullah, telah ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional. Penganugerahan gelar ini merupakan pertanda bahwa pesantren atau pendidikan agama secara umum, sangat mendukung semangat nasionalisme. Pesantren atau pendidikan

³⁶Lihat Din Wahid, "Nurturing the Salafi Manhaj: A Study of Salafi Pesantrens in Contemporary Indonesia," (Disertasi Doktor di Universitas Leiden, Belanda, 2014).

³⁷Din Wahid, "Nurturing the Salafi Manhaj," 274.

agama sama sekali tidak mengajarkan transnasionalisme, apalagi terorisme.

Tidak sedikit ulama Indonesia yang telah ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional.³⁸ Karena itu, sangat aneh jika ada seorang santri yang kemudian menyerukan gerakan transnasional. Santri seperti itu perlu dipertanyakan otentisitas keilmuan dan kesantriannya. Pesantren yang sangat menjunjung tinggi jaringan keilmuan (*sanad*) dan juga martabat seorang guru, tidak mungkin melahirkan generasi teroris jika melihat para kiai dan guru-guru pesantren yang telah banyak ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Pasti ada pengaruh dari luar pesantren jika memang ada orang yang mengaku sebagai santri, namun kemudian menjadi teroris.³⁹

Dulu, ada kesan bahwa para santri itu sangat primitif, tidak modern, dan tidak berjiwa nasionalis karena enggan mengikuti kurikulum pemerintah dan juga tidak menyelenggarakan upacara bendera. Tapi, anggapan seperti itu tidaklah benar karena terbukti peranan para *kiai* pesantren juga sangat besar dalam memperjuangkan kemerdekaan dan mempertahankan NKRI. Lebih lanjut, pemilu 1995 adalah bentuk kongkrit atas peranan santri dan kiai dalam membangun bangsa. Partai NU yang dimotori oleh para kiai dan didominasi oleh para santri yang umumnya dari pedesaan, berhasil menjadi salah satu partai terbesar di Indonesia dan berhasil masuk dalam parlemen.⁴⁰ Dengan demikian, pesantren tidak hanya menjadi lembaga pendidikan keagamaan saja, melainkan juga lembaga pendidikan sosial yang tidak kalah penting perannya dalam sejarah pembangunan negara-bangsa.

Bukti lain bahwa pesantren berperan penting dalam menumbuhkan jiwa nasionalisme adalah keluarnya fatwa resolusi jihad 1945. Lebih dari itu, beredarnya riwayat diktum (yang sering disebut-sebut sebagai hadis Nabi) tentang pentingnya membela

³⁸Sebelum KH. Abdul Wahab Hasbullah, ada banyak kiai yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional, di antaranya adalah KH. Hasyim Asy'ari, KH. Ahmad Dahlan, dan KH. Abdul Wahid Hasyim.

³⁹Martin van Bruinessen, "Traditional and Islamist Pesantren in Contemporary Indonesia," 239

⁴⁰Selengkapnya, lihat Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional* (Jakarta: Grafiti Press, 1987).

negara dan cinta tanah air (*ḥubb al-waṭan min al-īmān/Cinta tanah air adalah bagian dari iman*) juga menjadi bukti bahwa pesantren memiliki peranan besar dalam menumbuhkan nasionalisme dalam diri muslim Indonesia melalui pendidikan dan pengajaran.⁴¹ Fatwa dan riwayat—yang meskipun sangat lemah atau bahkan palsu jika disandarkan kepada Nabi saw—tersebut dijadikan sebagai media penanaman bibit-bibit nasionalisme dalam jiwa kaum santri. Dengan demikian, pesantrenlah yang mengajarkan bahwa agama dan negara adalah satu kesatuan.

Dalam kitab-kitab yang dikaji di pesantren, juga terdapat banyak hadis populer terkait nasionalisme. Riwayat tentang kecintaan Nabi saw terhadap Makkah dan Madinah sering disebut-sebut sebagai dalil pentingnya nasionalisme.

"[ʿA]n Ibn ʿAbbās qāla, qāla rasūl Allāh ṣallā Allāh ʿalayh wa sallam lammā ukhrij min Makkah, 'Innī la-ukhraj minkī wa innī aʿlam annakī aḥabb bilād Allāh ilayh wa akramuhū ʿalā Allāh, wa lawlā anna ahlakī akhrajūnī minkī, mā kharajtu minkī."

"Dari Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa ketika diusir dari Makkah, Rasulullah saw bersabda, 'Aku telah diusir darimu (Negeri Makkah). Aku tahu bahwa engkau adalah negeri Allah yang paling Dia cintai dan paling Dia muliakan. Seandainya pendudukmu tidak mengusirku darimu, pasti aku tidak akan pindah darimu.'" (HR. al-Haris bin Abu Usamah, Abu Ya'la, dan Ibnu Hibban)⁴²

⁴¹Tidak diketahui secara pasti ada dalam kitab apa diktum tersebut beredar. Namun tampaknya, hadis ini populer dari kitab *Dalīl al-Fāliḥīn* yang merupakan syarah kitab hadis terpopuler di pesantren, yaitu *Riyāḍ al-Ṣāliḥīn*. Hanya saja, yang jelas, diktum tersebut banyak beredar dari Pesantren dan kini tidak hanya dari pesantren saja, melainkan telah populer di hampir seluruh lembaga pendidikan. Diktum tersebut bahkan diyakini sebagai hadis Nabi, meskipun para ulama hadis mengingkarinya. Al-Sakhāwī dalam *al-Maqāṣid al-Ḥasanah* menegaskan bahwa hadis ini palsu jika disandarkan kepada Nabi, meskipun ia tidak mengingkari kebenaran kontennya.

⁴²Nūr al-Dīn al-Haythamī, *Bughyat al-Bāḥith ʿan Zawāʿid Musnad al-Ḥārith bin Usāmah* (Madinah: Markaz Khidmat al-Sunnah al-Nabawiyah, 1992), 460; Abū Yaʿlā al-Mūshafī, *Musnad Abī Yaʿlā* (Damaskus: Dār al-Maʿmūn li al-Turāth, 1984), v, 69.

Karena itulah, sesampainya perjalanan hijrah di Madinah, Nabi saw melantunkan sebuah doa yang juga populer dalam kitab-kitab andalan pesantren, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*,

"[Q]āla Rasūl Allāh ṣallā Allāh ‘alayh wa sallam, 'Allāhumma ḥabbib ilaynā al-Madīnah ka ḥubbinā Makkah aw ashadda."

"Ya Allah, tumbuhkanlah cinta dalam diri kami terhadap Madinah sebagaimana cinta kami terhadap Makkah, atau lebih (dari itu)." (HR. al-Bukhārī.)⁴³

Meski demikian, bukan berarti nasionalisme dapat diterima sepenuhnya oleh umat Islam Indonesia. Bagi para penentanginya, nasionalisme dianggap bertentangan dengan ajaran Islam tentang pentingnya *ukhuwwah islāmiyyah* yang tidak terbatas oleh wilayah teritorial (*ummah*). Nasionalisme dianggap sebagai penghalang tumbuhnya cinta sesama umat Islam global.⁴⁴ Namun, dalam sejarah pendidikan pesantren, nasionalisme yang tumbuh dari batas-batas teritorial Indonesia sama sekali tidak menafikan semangat *ukhuwwah islāmiyyah* global. Nasionalisme dalam konteks ini juga tidak sama dengan fanatisme primordial yang membatasi dan mempersempit wilayah *ukhuwwah islāmiyyah*. Dalam kitab-kitab Pesantren, hal ini ditegaskan oleh hadis Nabi saw,

"[‘A]n ‘Abbād bin Kathīr al-Shāmī min Ahl Filasṭīn ‘an imra’atin minhum yuqāl lahā Fasīlah qālat, sami‘tu Abī yaqūl, sami‘tu Rasūl Allāh ṣallā Allāh ‘alayh wa sallam, faqultu, yā Rasūl Allāh, a min al-‘aṣabīyah an yuḥibb al-rajul qawmah? Qāla, 'Lā. Lākin al-‘aṣabīyah an yu‘īn al-rajul qawmahū ‘alā al-ẓulm."

Dari Abbad bin Katsir al-Syami, dari Fasilah yang mendengar ayahnya berkata, Aku bertanya bertanya kepada Nabi saw, "Ya Rasulullah, apakah termasuk fanatisme jika seseorang mencintai kaumnya?" Nabi saw pun menjawab,

⁴³Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Beirūt: Dār Ibn Kathīr al-Yamāmah, 1987), iii, 1428, hadis no. 3711.

⁴⁴al-Ahsan, *Ummah or Nation?*, 23.

"Tidak. Melainkan, yang termasuk fanatisme adalah ketika seseorang mendukung/membantu kaumnya untuk berbuat kezaliman." (HR. Ibn Majah dan Ahmad).⁴⁵

Dalam hadis lain bahkan Nabi saw menyebut bahwa pembelaan terhadap kaum sendiri (tanah air) adalah sebuah keharusan, selama tidak menyalahi ajaran agama.

"[Q]āl Rasūl Allāh ṣallā Allāh ‘alayh wa sallam, Khayrukum al-dāfi‘ ‘an qawmih mā lam ya'tham."

"(Orang) terbaik di antara kalian adalah yang membela kaumnya, selama tidak berdosa." (HR. al-Ṭabrānī dan Abū Dāwūd).⁴⁶

Dari teks-teks itulah, para ulama dari berbagai pesantren di Indonesia menyatakan bahwa cinta tanah air adalah bagian dari ajaran agama. Teks-teks tersebut berubah menjadi sebuah aksi nasionalisme berciri khas pesantren. Aksi yang paling nyata dalam sejarah perjuangan dan pembelaan pesantren terhadap bangsa Indonesia adalah lahirnya pejuang-pejuang dari barisan Laskar Hizbullah. Aksi ini lahir dari semangat *jihād fī sabīlillah* yang merupakan ajaran Islam. Dengan demikian, pesantren telah berkontribusi besar dalam membangun nasionalisme melalui pendidikan.

Sistem pendidikan pesantren bahkan mencerminkan sejarah nasionalisme yang panjang. Pada masa kolonial, pesantren menolak sistem pendidikan kolonial, mulai dari cara berpakaian, sistem kelas, sarana belajar, hingga aksara tulis-menulis yang semuanya dibuat berbeda dari Belanda yang menjajah bangsa.⁴⁷ Sistem tersebut tidak lain adalah wujud pembelaan terhadap tanah air dan pemberontakan terhadap pemerintah Hindia-Belanda. Dengan

⁴⁵Ibn Mājah al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah* (Beirūt: Dār al-Fikr, t.th.), ii, 1302. Lihat juga Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad Aḥmad* (Beirūt: Muassasah al-Risālah, 1999), xxviii, 196.

⁴⁶Abū Dāwūd al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd* (Beirūt: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, t.th.), iv, 493. Lihat juga al-Ṭabrānī, *al-Mu‘jam al-Kabīr* (Mūṣal: Maktabah al-‘Ulūm wa al-Ḥikam, 1983), iv, 198.

⁴⁷Diskusi kelas dengan Prof. Abdul Malik Fadjar, pada 24 November 2014.

demikian, pendidikan pesantren pada dasarnya adalah pendidikan nasionalisme sekaligus simbol persatuan antara agama dan negara.

Kiai Ahmad Dahlan yang disebut-sebut sebagai pembaru dalam pendidikan Islam di Indonesia dengan mengadopsi sistem pendidikan Belanda, pada dasarnya juga sedang membangun nasionalisme. Kiai Dahlan tidak ingin bahwa masyarakat priayi yang dididik oleh Belanda itu kelak memimpin dan menjadi orang profesional di negara ini tanpa memiliki semangat keagamaan. Kiai Dahlan khawatir jika di kemudian hari Indonesia dipimpin oleh orang-orang yang berpikiran menjajah. Dengan pendidikan agamalah, beliau memperjuangkan nasionalisme, mengikis doktrin Belanda yang hendak menguasai Indonesia melalui jalur pendidikan.⁴⁸

F. Kurikulum Agama Berbasis Keindonesiaan dan Kewargaan

Sejarah perjalanan bangsa menyatakan bahwa Indonesia sering dihadapkan pada beberapa fenomena yang membahayakan keutuhan NKRI.⁴⁹ Beberapa fenomena yang mengancam tersebut di antaranya adalah disintegrasi, disorientasi, dan dislokasi budaya, serta krisis sosio kultural. Fenomena ini terjadi karena melemahnya sistem siaga dini (*early warning system*). Maka, gempuran budaya (*cultural imperialism*) dari luar pun menjadi tak terbendung dan pada gilirannya melahirkan kultur yang tidak memiliki identitas.⁵⁰

Dalam konteks negara yang beragama seperti Indonesia ini, memberdayakan ajaran agama untuk menjaga satabilitas negara-bangsa adalah sangat penting, meskipun tidak mudah. Biasanya, kekuatan politik dipandang sebagai kekuatan supra untuk mengatasi kesulitan ini. Namun sayangnya, seringkali kekuatan supra tersebut justru memiliki kecenderungan yang sangat kuat untuk melaksanakan politik keseragaman, totalitarian, dan kesewenangan. Padahal secara

⁴⁸Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta: LP3ES, cet. 2, 1982), 84-95.

⁴⁹Jika dahulu ada DI/TII, NII, LDII maka belakangan muncul HTI, dan ISIS. Semuanya dikelompokkan sebagai gerakan transnasionalisme muslim yang berkembang di Indonesia. Kecuali tentang ISIS, lihat dalam *Ilusi Negara Islam*, Bab III, tentang Ideologi dan Agenda Gerakan Garis Keras di Indonesia.

⁵⁰Azyumardi Azra, *Merawat Kemajemukan, Merawat Indonesia* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 9.

tidak langsung, kebijakan tersebut justru dapat menghancurkan kearifan lokal yang menjadi identitas nasional.⁵¹ Inilah yang justru dapat dengan mudah memicu massifnya gerakan-gerakan transnasional. Bahkan, sebagian besar dari gerakan transnasional tersebut membawa nama Islam.

Sebuah pekerjaan rumah yang berat bagi para ulama dan umat Islam seluruhnya untuk menjadikan agama sebagai benteng pertahanan nasional. Misi tersebut harus dijalankan secara humanis dan bertahap melalui pendidikan.⁵² Pemikiran tentang pentingnya pendidikan agama berbasis keindonesiaan dan kewargaan perlu dicoba untuk diterapkan di berbagai lembaga pendidikan. Namun perlu diingat bahwa pendidikan dalam hal ini bukan berarti sekadar sarana transformasi pengetahuan dan peningkatan pemahaman tentang nasionalisme berbasis agama atau pendidikan agama berbasis nasionalisme, melainkan juga sarana pengejawantahan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari.⁵³ Demikian itulah model dan metode pendidikan yang diterapkan oleh Nabi.⁵⁴ Dalam istilah yang lebih kontemporer model seperti ini biasa dikenal dengan kurikulum berbasis pembiasaan nilai-nilai (*habitual curriculum*). Dalam hal ini, pesantren dapat dijadikan model utama lembaga pendidikan agama berbasis *habitual curriculum* dan berciri khas keindonesiaan dan kewargaan.

Pesantren adalah lembaga pendidikan yang paling orisinal milik bangsa Indonesia. Ki Hajar Dewantara ketika merumuskan model sistem pendidikan nasional selalu mengusung pesantren sebagai model lembaga pendidikan yang tepat dan asli (*genuine*) Indonesia. Pendidikan di pesantren selalu menitikberatkan pada penanaman nilai

⁵¹Azra, *Merawat Kemajemukan, Merawat Indonesia*, 7-9. Bandingkan dengan Melani Budianta, "Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural: Sebuah Gambaran Umum," dalam *Tsaqafah*, vol. 1, No. 2, 2003, 8-16.

⁵²Azra, *Merawat Kemajemukan, Merawat Indonesia*, 18. Lihat juga Parsudi Suparlan, "Masyarakat Majemuk Indonesia dan Multikulturalisme" (Makalah Seminar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2004), 14.

⁵³Azra, *Merawat Kemajemukan, Merawat Indonesia*, 17-23. Lihat juga Parsudi Suparlan, Parsudi Suparlan, "Masyarakat Majemuk Indonesia dan Multikulturalisme" (Makalah Seminar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2004)

⁵⁴Misalnya, Nabi tidak akan pindah ke surah lain sebelum surah tersebut dihafal dan diamalkan oleh para sahabat yang belajar.

dan pengejawantahannya dalam kehidupan sehari-hari (*everyday life*).⁵⁵ Bimbingan yang intensif, pemahaman agama yang komprehensif, serta pembinaan sosial yang masif membuat pesantren dinilai tepat sebagai basis pengaderan ulama yang nasionalis.

Idealnya, dalam struktur kurikulum pada setiap jenjang pendidikan Islam, baik formal, informal, maupun non-formal, harus dimasukkan ajaran nasionalisme religius secara holistik (*shāmil*). Bahkan perlu dibuatkan mata pelajaran khusus misalnya, tentang fiqh kenegaraan, fiqh kebangsaan, dan fiqh kewargaan. Secara umum, meskipun mata pelajaran tersebut tidak ada dalam kurikulum pesantren, hingga kini nilai-nilai tersebut telah tertanam dengan baik dalam kurikulum pesantren. Pelajaran tafsir, hadis, akidah, fikih, dan akhlak adalah dasar dari pengajaran nilai-nilai tersebut di pesantren.

Fikih *siyāsah* (fikih kenegaraan) yang diajarkan di pesantren adalah fikih yang sangat moderat dan mendukung nasionalisme. Faham Ahlus-Sunnah wal Jamaah yang menjadi mazhab resmi pesantren di Indonesia juga membenarkan nasionalisme.⁵⁶ Di samping itu, ajaran tasawuf yang berkembang di pesantren juga membuat para

⁵⁵Lihat Polemik Kebudayaan, 43-51.

⁵⁶Bahkan mazhab ini mengharuskan ketaatan kepada pemimpin, meskipun pemimpin itu tidak taat kepada agama Islam. Ibn Taymiyah (728 H) juga dengan tegas menyatakan pentingnya mengangkat sebuah pemimpin. Ia memprediksikan sebuah Negara tanpa sesosok pemimpin, dalam sekejap akan hancur. Betapapun watak dan karakter sesosok pemimpin tetap harus dihargai. Ia menegaskan bahwa enam puluh tahun di bawah kepemimpinan seorang yang lalim adalah jauh lebih baik daripada satu malam tanpa seorang pemimpin. Redaksi pernyataan Ibn Taymiyah tersebut adalah, *Sittūna sanah min imām jā'ir aṣlah min laylatin bi lā sultān*. Lihat Ibn Taymiyah, *al-Siyāsah al-Shar'iyah* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th.), 47. Ibn Taymiyah ini pulalah yang kemudian melandasi lahirnya sebuah fatwa haram golput MUI. Dalam tradisi Pesantren, literatur-literatur ilmu kalām seringkali menegaskan sebuah hadis bahwa seorang muslim yang meninggal tanpa baiat kepada pemimpin, maka kematiannya seperti orang Jahiliyah. Lebih lanjut, secara sosiologis, Saiful Mujani juga menegaskan bahwa kegiatan-kegiatan sosial keagamaan di kampung, seperti tahlilah, diba'an, barzanjian, dan yasinan memiliki peranan yang sangat besar dalam menumbuhkan nasionalisme. Melalui kegiatan-kegiatan itulah, demokrasi di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Masyarakat juga dapat berpartisipasi aktif dalam mengawal demokrasi Indonesia. Ini menunjukkan semangat nasionalisme warga yang sangat tinggi.

santri jauh dari perilaku yang mengarah pada disintegrasi bangsa, gerakan radikalisme, transnasionalisme, apalagi terorisme.⁵⁷

Kurikulum pesantren memang seringkali berbeda dari kurikulum pendidikan nasional, karena memang target dan tujuan utamanya yang juga tidak sama. Namun, hal itu bukan berarti bahwa kurikulum pesantren didesain untuk selalu berbeda atau bahkan menentang pemerintah. Pesantren bahkan dengan kurikulumnya yang khas tersebut dapat memperkuat nasionalisme dan tentunya mendukung negara bangsa Indonesia. Penanaman jiwa sosial dan pengabdian kepada masyarakat seringkali membuat pesantren begitu cinta terhadap hal-hal yang *genuine* milik masyarakat Indonesia. Dengan demikian, pesantren secara tidak langsung telah mengkonservasi tradisi asli masyarakat lokal yang merupakan identitas dan kekayaan budaya bangsa Indonesia.

G. Penutup

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pemahaman keagamaan yang komprehensif dan holistik menumbuhkan nasionalisme yang tinggi terhadap bangsa. Hal ini karena pemahaman yang komprehensif merefleksikan suatu kearifan syariat. Akibatnya, kearifan syariat tersebut dapat bersinergi secara baik dengan kearifan lokal. Keduanya harus selalu dijaga untuk menumbuhkan nasionalisme dalam konteks Indonesia, khususnya.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan asli Indonesia merupakan representasi dari sinergisme kearifan lokal dan kearifan syariat. Kearifan tersebut terbukti tidak mengakibatkan lemahnya nasionalisme, melainkan justru memperkuat dan bahkan dapat mengobarkan semangat perjuangan bangsa. Melalui kurikulumnya yang khas, Pesantren telah mampu membuktikan kesetiaannya kepada negara dan agama sekaligus, tanpa mengabaikan salah satunya. Bahkan dalam hal ini, pesantren dapat dijadikan sebagai model lembaga pendidikan inklusif, multikulturalis, dan nasionalis.

⁵⁷Iik Arifin Mansurnoor, "Revivalism and Radicalism in Southeast Asian Islam: A Pattern or an Anomaly?," dalam *New Zealand Journal of Asian Studies* 11, 1 (Juni, 2009), 222-262.

Setidaknya, demikianlah beberapa argumen pentingnya melestarikan pendidikan agama secara komprehensif yang dapat memperkuat keutuhan NKRI dan memupuk jiwa nasionalisme. Sebagai lembaga yang konsen terhadap pendidikan agama secara komprehensif, pesantren harus tetap membentengi bangsa Indonesia ini dengan cara [1] penanaman akidah yang kuat secara benar (dalam hal ini Ahlussunnah wal Jamaah adalah representasi mazhab Pesantren); [2] memberikan pendidikan dan pengajaran Islam berwawasan keindonesiaan dan kewargaan secara komprehensif serta berbasis praktik, pembiasaan nilai (*akhlak*), pengabdian, dan keteladanan.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abdullah, Muḥammad Ḥusayn. *Dirāsāt fī al-Fikr al-Islāmīy*. Beirut: Dār al-Bayārīq, 1990.
- al-Ahsan, Abdullah. *Ummah or Nation? Identity Crisis in Contemporary Muslim Society*. Wiltshire: Cromwell Press Ltd., 1992.
- Ali, Muhammad. "Islam and the Indonesian Nation-State: the Religio-Political Thought of Abdurrahman Wahid." (Makalah, tidak diterbitkan)
- Azra, Azyumardi. *Merawat Kemajemukan, Merawat Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Al-Bayhaqī, Abū Bakr Aḥmad bin al-Ḥusayn bin ‘Alī. *al-Sunan al-Kubrā*. Haydar Ābād: Majlis Dā’irat al-Ma‘ārif al-Niḏāmīyah al-Kā’inah, 1344 H.
- al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā‘īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār Ibn Kathīr al-Yamāmah, 1987.
- Bruinessen, Martin van., Farish A. Noor, dan Yoginder Sikand (Eds.), *The Madrasa in Asia: Political Activism and Transnational Linkages*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2008.
- Budianta, Melani. "Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural: Sebuah Gambaran Umum," dalam *Tsaqafah*, vol. 1, No. 2, 2003, 8-16.
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan terhadap Kiai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. Jakarta: LP3ES, cet. 8, 2011.
- Emerson, Rupert. *From Empire to Nation: the Rise of Self-Assertion of Asian and African People*. Cambridge: Harvard University Press, 1960.
- Feener, R. Michael. "Indonesian Movements for the Creation of a 'National Madhhab'," dalam *Islamic Law and Society*, vol. 9, No. 1 (2002), 83-115.
- Feith, Herbert., dan Lance Castles (Eds.), *Indonesian Political Thinking 1945-1965*. Jakarta-Kuala Lumpur: Equinox Publishing, 2007.

- Geertz, Clifford. "The Javanese Kijaji: The Changing Role of a Cultural Broker," dalam *Comparative Studies in Society and History*, 2, No. 2 (Januari, 1960): 228-249.
- , *Islam Observed: Religious Development in Morocco and Indonesia*. New Haven, Conn., 1968.
- Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. *al-Iqtisād fī al-I'tiqād*. Beirut: Dār Qutaybah, 2003.
- al-Ḥaḍramī, ‘Abd al-Raḥmān bin Muḥammad bin Ḥusayn bin ‘Umar Bā‘alawī. *Bughyat al-Mustarshidīn*. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- al-Haythamī, Nūr al-Dīn. *Bughyat al-Bāḥith ‘an Zawā’id Musnad al-Ḥārith bin Usāmah*. Madinah: Markaz Khidmat al-Sunnah al-Nabawiyah, 1992.
- Hefner, Robert W. "The Politics and Cultures of Islamic Education in Southeast Asia," dalam Robert Hefner (Ed.), *Making Modern Muslims: the Politics of Islamic Education in Southeast Asia*. Honolulu: University of Hawai'i Press, 2009.
- Ibn Ḥanbal, Aḥmad. *Musnad Aḥmad*. Beirut: Muassasah al-Risālah, 1999.
- Ibn Taymiyah. *al-Siyāsah al-Shar‘īyah*. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, t.th.
- Jackson, Robert. *Rethinking Religious Education and Plurality: Issues in Diversity and Pedagogy*. London-New York: Routledge Falmer, 2004.
- Mansurnoor, Iik Arifin. "Revivalism and Radicalism in Southeast Asian Islam: A Pattern or an Anomaly?," dalam *New Zealand Journal of Asian Studies* 11, 1 (Juni, 2009).
- Mihardja, Achadiat K. *Polemik Kebudayaan*. Jakarta: Pustaka Jaya, cet. 4, 1986.
- al-Mūshālī, Abū Ya‘lā. *Musnad Abī Ya‘lā*. Damaskus: Dār al-Ma'mūn li al-Turāth, 1984.
- Noer, Deliar. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES, cet. 2, 1982.
- Noer, Deliar. *Partai Islam di Pentas Nasional*. Jakarta: Grafiti Press, 1987.
- al-Qazwīnī, Ibn Mājah. *Sunan Ibn Mājah*. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.

- Al-Shāṭibī. *al-Muwāfaqāt fī ‘Ulūm al-Sharī‘ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th.)
- al-Sijistānī, Abū Dāwūd. *Sunan Abī Dāwūd*. Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, t.th.
- Smith, Anthony. *Theories of Nationalism*. London: Duckworth, 1983.
- Suparlan, Parsudi. "Masyarakat Majemuk Indonesia dan Multikulturalisme" (Makalah Seminar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2004).
- al-Ṭabrānī. *al-Mu‘jam al-Kabīr*. Mūṣal: Maktabah al-‘Ulūm wa al-Ḥikam, 1983.
- Veer, Peter van der. dan Hartmut Lehmann (Eds.) *Nation and Religion: Perspectives on Europe and Asia*. Princeton: Princeton University Press, 1999.
- Wahid, Abdurrahman, (Ed.). *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*. Jakarta: The Wahid Institute, The Maarif Institute, dan Gerakan Bhinneka Tunggal Ika, 2009.
- Wahid, Din. "Nurturing the Salafi Manhaj: A Study of Salafi Pesantrens in Contemporary Indonesia," (Disertasi Doktor di Universitas Leiden, Belanda, 2014).